

IMPLEMENTASI PRINSIP AMAR MAKRUF NAHI MUNKAR SEBAGAI ETIKA POLITIK

Dirga Arif Wardana

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
dirgaarifwardana@gmail.com

Hotmatua Paralian

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
hotmatuaparalian@uinsu.ac.id

Yuzaidi

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
yuzaidi@uinsu.ac.id

ABSTRACT

This thesis describes the implementation of the principle of Amar Ma'ruf Nahi Munkar as an Islamic political ethic. Amar Ma'ruf Nahi Munkar refers to efforts to achieve collective benefit, not solely for a particular group or community. This study aims to determine the extent to which the principle of Amar Ma'ruf Nahi Munkar is implemented as an Islamic political ethic. Islam teaches its followers to adhere to good ethics, with Amar Ma'ruf Nahi Munkar serving as a guiding principle. This research employs a qualitative method with a descriptive approach. The findings of this study reveal that Amar Ma'ruf Nahi Munkar is one of the fundamental teachings of Islam, commanded by Allah for Muslims to practice. To establish a strong and civilized Muslim society, a unifying principle is needed to guide individuals in performing good deeds and avoiding wrongdoing, ultimately achieving shared well-being. In this context, Amar Ma'ruf Nahi Munkar is the principle offered by Islam to build a robust and civilized society.

Keywords: Implementation, Amar Ma'ruf Nahi Munkar, Islamic Political Ethics

ABSTRAK

Skripsi ini mendeskripsikan tentang implementasi prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar Sebagai Etika Politik. Amar Ma'ruf Nahi Munkar adalah upaya untuk mewujudkan kemaslahatan bersama, bukan untuk satu golongan atau kelompok tertentu saja. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui sejauh mana implementasi prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar yang digunakan sebagai etika politik Islam. Islam mengajarkan

umatnya untuk beretika dengan baik. Salah satunya menggunakan Amar Ma'ruf Nahi Munkar sebagai pedomannya. Penelitian ini menerapkan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini adalah salah satu landasan utama ajaran Islam yang Allah perintahkan kepada sesama muslim untuk dilaksanakan. Untuk mewujudkan masyarakat muslim yang kuat dan beradab, diperlukan prinsip yang menyatukan setiap individu dalam melakukan kebaikan dan menjauhi keburukan untuk mencapai ke-baikannya bersama. Dalam hal ini, Amar Makruf Nahi Munkar adalah prinsip yang ditawarkan Islam dalam membangun masyarakat yang kuat dan beradab.

Kata Kunci: Implementasi, Amar Makruf Nahi Munkar, Etika Politik Islam

Pendahuluan

Islam telah menimbulkan persaudaraan dan menyebut umat manusia yang nyaris terbenam ke dalam neraka untuk dipelihara kembali untuk masuk ke surga. Kokohnya nikmat tersebut hendaklah ada dalam kalangan jamaah muslimin dari suatu golongan dalam ayat tersebut ditegaskan suatu umat yang menyediakan diri mengadakan ajakan atau seruan, tegasnya dakwah. Yang selalu mesti mengajak dan membawa manusia berbuat kebaikan, menyuruh berbuat makruf, yaitu yang patut, pantas dan sopan juga melarang perbuatan munkar yang dibenci dan yang tidak diterima.¹

Kegiatan amar makruf nahi mungkar sering disebut dakwah Islamiyah, yakni menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Amar makruf nahi mungkar adalah puncak tertinggi dalam agama menurut sebagian ulama, tanpa amar makruf nahi mungkar syariat agama tidak akan berjalan, bahkan seluruh Rasul Allah diutus demi mengajak umatnya kepada kebaikan dan mencegah mereka dari kemungkaran.² Jika tanpa adanya amar makruf nahi mungkar, maka kejahatan merajalela, kerusakan

¹ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983) juz 4, 30.

² Syamsul Bahri & Besse Hadijah Abbas. *Kedudukan dakwah dan Amar Makruf nahi mungkar*. Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, 1, No. 2, 2020, 8.

dimana-mana, kemaksiatan akan terasa seperti biasa dan ketaataan terasa asing.

Salah satu term yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis yaitu amar makruf nahi munkar. Di kalangan masyarakat muslim, term ini seringkali digunakan dalam jargon dakwah Islam, yang mengambil bentuk doktrin keagamaan, penyampaian kebenaran dan penentangan terhadap segala bentuk doktrin keagamaan, penyampaian kebenaran dan penentangan terhadap segala bentuk kezaliman dan ketidakadilan. Ternyata ini juga sering dijadikan justifikasi terhadap penolakan terhadap semua hal yang terkait dengan perbuatan yang menyimpang dari norma agama, dan membenarkan perbuatan yang dilakukan atas nama agama.

Istilah amar makruf nahi munkar terdiri dari empat kosa kata. Kosa kata pertama dan kedua amar makruf, yakni amar berasal dari kata amara-ya'muruamran, yang artinya menyuruh, memerintahkan, mengajak, membebani sesuatu untuk dilakukan, lawan kata naha-yanha-nahyan. Makruf dari akar kata 'arafaya'rifu-makrufan, alima-ya'lamu-'ilman, yang artinya diketahui, dikenal, yang terkenal, termasyur, kebajikan, sesuatu yang diketahui kebajikannya dengan akal maupun syarak, lawan kata munkar.³

Istilah nahi munkar yang terdiri dari kosakata ketiga dan keempat, yakni nahi dan munkar. Nahi dari akar kata naha-yanha-nahyan, yang artinya melarang, mencegah, menghakangi, menghentikan, lawan kata amara-ya'muru-amran. Munkar dari akar kata nakara, ankara-yunkiru-inkaran-munkaran, artinya yang tidak dikenal, perkara yang keji, tidak diterima, yang ditolak, yang dihukumi buruk oleh akal, lawan kata makruf. Amar makruf mengandung arti memerintahkan orang untuk beriman kepada Allah Swt. dan Rasul-Nya dan melaksanat syariat-Nya. Nahi munkar mengandung arti mencegah kemusyrikan, mendustakan

³ Kemenag RI, *Amar Makruf Nahi Munkar*, (Jakarta, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2013), 16.

Nabi Sallallahu ‘alaihi wasallam dan mencegah dari apa yang dilarang-Nya.⁴

Dalam QS. Ali Imran: 104 Allah Swt. Berfirman:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ

الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung”

Dalam mengartikan amar makruf nahi munkar al-Ghazali mengatakan bahwa amar makruf nahi munkar adalah suatu poros atau tiang utama dalam agama, ia merujuk pada Al-Qur’an surat Ali-Imran ayat 104. Menurut al-Ghazali, untuk membumikan ajaran amar makruf nahi munkar, ruang lingkup yang hendak dicapai harus bersinergi antara satu dengan lainnya. Ia harus memulai dari pribadinya sendiri agar dapat menjadi mukmin teladan. Cobalah menjadi salah satu dari dua orang ini, lebih mementingkan urusan pribadi ataukah mengurus orang lain setelah dirinya. Maka jalan terbaiknya adalah jangan sampai mementingkan urusan orang lain sebelum memperbaiki diri sendiri.⁵

Menurut al-Ghazali dalam permasalahan amar makruf nahi munkar terdapat beberapa hal, namun al-Ghazali lebih memfokuskan pada pembahasan nahi munkar saja. Pertama, orang yang mencegah perbuatan munkar. Kedua, orang yang melakukan perbuatan munkar. Ketiga, perbuatan munkar yang dicegah. Dan

⁴ Kemenag RI, *Amar Makruf Nabi Mumkar*, 17.

⁵ Ali Muhammad ash-Shaallabi, *Biografi Imam Al-Ghazali & Syekh Abdul Qadir Jailani*, (Jakarta: Beirut Publishing, 2015), 125.

keempat, cara mencegah kemunkaran. Setiap hal mempunyai ketentuan dan syarat masing-masing.⁶

Berkaitan dengan perbuatan yang munkar, al-Ghazali juga membagi tiga jenis perbuatan yang masuk kategori munkar, masing-masing akan dijelaskan berikut ini. Pertama, perbuatan dosa besar yang sudah berlangsung dan hukumannya sudah ditetapkan di dalam Al-Qur'an, maka mencegah atau melarang perbuatan munkar yang demikian hukumnya adalah wajib. Dan hukuman bagi orang yang melakukan perbuatan demikian harus dilakukan penguasa.⁷

Kedua, perbuatan dosa yang masih atau sedang dilakukan oleh pelakunya, seperti orang yang minum khamar, orang yang berjudi, memakai pakaian sutera, menggunakan bejana dari emas dan perak dan lain-lain. Kemungkaran yang masih atau telah berlangsung wajib dicegah yaitu dengan nasihat atau dengan perbuatan mencegah yang nyata dan tegas.

Ketiga, perbuatan munkar yang belum atau akan terjadi, seperti orang yang berniat hendak mencuri. Apabila niat itu diketahui, maka orang yang mengetahui wajib mencegah perbuatan tersebut dan menyadarkannya hingga bertobat.

Aspek politik adalah salah satu di antara aspek - aspek yang diatur oleh Islam dengan cara yang tidak formal-spesifik. Misalnya ia tidak mengatur hal-hal terkait bentuk negara, pembagian kekuasaan, batas wewenang, dan sistem pemilihan kepala negara. Namun bukan berarti jika Islam tidak mengatur aspek politik secara formal maka ia dianggap sebagai hal yang superfisial dan tidak penting. Sebaliknya, Islam memerhatikan aspek politik bukan dari aturan formal, melainkan dari aturan nonformal berupa nilai-

⁶ Al-Ghazali, *Ihya Ulumiddin Menghidupkan Kembali Ilmu-Ilmu Agama Jilid Ke-3 Akhlak Keseharian*, (Jakarta: Republika, 2011), 340.

⁷ Al-Ghazali, *Ihya Ulumiddin Menghidupkan Kembali Ilmu-Ilmu Agama Jilid Ke-3 Akhlak Keseharian*, 344.

nilai universal yang terdapat dalam ayat-ayat Alquran dan Hadis. Hal tersebut demikian karena permasalahan politik adalah satudi antara urusan-urusan keduniaan (*al-umūr al-dunyawiyyah*) yang aturannya diserahkan kepada manusia sendiri, sebab berdasarkan hadis Nabi Muhammad, manusialah yang lebih tahu tentang urusan-urusan keduniaan mereka.⁸

Kebebasan manusia untuk merumuskan aturan mengenai urusan-urusan perpolitikan dapat dilihat sebagai bentuk pemuliaan sekaligus pembebanan Allah terhadap manusia. Dikatakan pemuliaan, sebab jika sistem politik akan diatur secara statis dan eksklusif maka akan memberatkan manusia untuk menjalaninya, sedangkan mereka memiliki situasi dan kondisi yang terus berubah - ubah dan memerlukan aturan partikular yang juga berubah - ubah.⁹

Dikatakan pembebanan sebab manusia dituntut untuk menciptakan suatu sistem politik berkeadilan yang menjamin kelangsungan masyarakatnya, terpenuhinya hak - hak mereka, serta terjaganya mereka dalam kebaikan dan ketaatan pada Allah; hal ini adalah beban yang cukup berat untuk diambil (namun harus dilakukan) oleh manusia.¹⁰

Dalam memberikan mandat untuk merumuskan aturan-aturan partikular tersebut, Islam tetap menggariskan prinsip - prinsip dan nilai-nilai universal yang harus dipatuhi sebagai acuan. Prinsip-prinsip ini sebagaimana termaktub dalam AlQur'an seperti keadilan (*al-'adl*), musyawarah (*al-musyawwarah/syūrā*), dan Amar Makruf Nahi Munkar (*al-amr bi al-ma'rūf wa al-nahy 'an al-munkar*). Keadilan dapat dianggap sebagai tujuan politik, yaitu keadaan dimana tiap warga negara akan mendapat hak-hak dasar

⁸ Muhyiddin bin Syaraf al-Nawawi, *Shabih Muslim bi Syarb al-Nawani*, (Kairo: Syarikah al-Quds, 2016), 24.

⁹ Ahmad Syafii Maarif, *Sistem Khilafah dalam Tradisi Islam*, Titik Temu, 1, no. 2, Januari-Juni 2009), 73-74.

¹⁰ Ahmad Syafii Maarif, *Sistem Khilafah dalam Tradisi Islam*, 83-84.

mereka dengan adil. Musyawarah berperan sebagai sistem dan tata cara dalam merumuskan aturan-aturan perundang-undangan. Sedangkan amar makruf nahi munkar akan berperan sebagai etik dasar dalam sistem politik suatu negara yang akan diimplementasikan baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

Dalam sejarah politik keagamaan, istilah amar makruf nahi munkar digunakan, baik dalam bentuk mempertahankan keyakinan, atau bagian dari jihad fii sabilillah maupun sebagai doktrin keagamaan yang mesti dipertahankan dan diperjuangkan secara konsisten. Bagi kaum muktazilah memperjuangkan amar makruf nahi munkar, yakni dengan cara mencegah perbuatan dosa, mendorong orang yang berbuat dosa agar sadar dan memohon ampunan kepada Allah Swt. Serta dihukum jika ternyata bersalah melanggar hukum.

Pandangan golongan di atas berbeda dengan teologi asya'riyah yang lebih moderat, bahwa perintah makruf dan mencegah munkar tidak perlu dengan kekerasan dan intimidasi. Akan tetapi dilakukan sikap lunak dan bijak adalah pilihan utama. Pemikiran ini juga didasari pada perintah untuk memberikan peringatan kepada manusia dengan cara lebih baik, menyampaikan nasihat dengan bijak, dan dengan argumentasi yang santun.¹¹

Namun interpretasi dominan terhadap prinsip amar makruf nahi munkar adalah bahwa ia hanyalah prinsip yang berlaku dalam aspek ibadah murni dan halal-haram belaka. Dalam interpretasi eksklusif seperti ini, para individu-individu Muslim dituntut untuk selalu memberi nasihat dan peringatan kepada sesama Muslim dalam beribadah dan bermuamalah bersama orang lain. Mengingatkan saudara Muslim untuk tetap salat tepat waktu, dan menegurnya jika ia berbohong atau berbuat curang dalam berjual

¹¹ Kusnadi Zulkhildi Zulkarnain, *Makna Amar Makruf Nahi Munkar Menurut Muhammad Asad Dalam Kitab The Message of The Qur'an*, Wardah, 18, no. 2 Palembang, 2017), 97.

beli, adalah contoh dari interpretasi ini. Tak dapat disangkal bahwa interpretasi ini adalah benar belaka, sebab memang begitulah cermiman prinsip amar makruf nahi munkar jika diterapkan.

Namun prinsip ini sebenarnya memiliki interpretasi yang lebih luas dari hanya sekadar ibadah murni dan halal-haram, misalnya interpretasi etis dalam kaitannya dengan aspek politik. Interpretasi ini berarti bahwa amar makruf nahi munkar adalah etika politik yang ditawarkan Islam dalam membentuk suatu masyarakat yang kuat dan beradab. Dalam tataran ini, amar makruf nahi munkar telah memiliki makna yang mencakup urusan-urusan keduniaan, namun ia tetap bersifat religius.

Etika politik (*political ethics*), sebagai sudut pandang baru dalam memandang prinsip amar makruf nahi munkar, dapat diartikan sebagai pedoman manusia dalam menjalankan peran-peran politiknya. Pada dasarnya, etika adalah salah satu bagian dari Filsafat yang langsung mempertanyakan praksis manusia, yakni kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai manusia. Politik dan etika sesungguhnya adalah dua hal yang berbeda. Politik adalah dunia kekuasaan murni yang diatur dengan asumsi-asumsi kebijakan, sedangkan etika adalah dunia prinsip murni yang diatur oleh imperatif moral. Namun demikian, penggabungan etika dalam politik adalah sesuatu yang penting karena ia akan mengarahkan manusia pada hidup yang baik dan bersama, dalam rangka memperluas lingkup kebebasan dan membangun institusi-institusi yang adil.¹²

Maka dari itu, konsekuensi wajib bagi setiap masyarakat, khususnya yang sadar dan tahu terhadap kondisi yang ada, adalah senantiasa untuk amar makruf nahi munkar. Amar makruf nahi munkar merupakan salah satu pilar ajaran Islam yang sangat fundamental (dasar). Amar makruf nahi munkar itu satu sama

¹² Eko Handoyo, dkk, *Etika Politik*, (Semarang: Widyia Karya Press, 2016), 55- 59.

lainsaling melengkapi, mengisi, mengukuhkan dan menyempurnakan eksistensinya. Aktivitas amar makruf niscaya diikuti dengan nahi munkar, sedangkan aktivitas nahi munkar niscaya ditindak lanjuti dengan amar makruf.¹³

Dari uraian-uraian diatas peneliti tertarik untuk membahasnya di skripsi dengan judul “Implementasi Prinsip *Amar Makruf Nahi Munkar* Sebagai Etika Politik Islam”.

Metodologi Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research), yaitu suatu rangkaian kegiatan yang berkenaan dengan pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengkaji bahan penelitian.¹⁴ Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti berlandaskan pada filsafat positivisme, dipakai untuk meneliti pada populasi ataupun sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan alat ukur (instrumen) penelitian, analisa data bersifat kualitatif/Statistik, dengan tujuan untuk menguji dan membuktikan hipotesis yang telah di tetapkan.¹⁵

Dalam pengumpulan data, penulis mengumpulkan dengan penelusuran kepustakaan dari berbagai sumber perpustakaan serta mencari informasi terkait di buku-buku, artikel-artikel dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan judul penelitian.

Pembahasan

1. Prinsip Amar Makruf Nahi Munkar.

Konsep berasal dari bahasa inggris yaitu “concept” yang artinya pengertian atau ide yang diabstrakkan dari peristiwa

¹³ Kemenag, *Amar Makruf Nabi Munkar*, 16.

¹⁴ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 3.

¹⁵ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Yogyakarta: Erlangga, 2009), 24.

konkrit. Ada juga yang mengatakan konsep yaitu ide umum, pengertian, pemikiran, rancangan, dan rencanarencana dasar. Sesuatu yang mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar dari sejumlah kejadian, keadaan, kelompok atau individu tertentu.¹⁶ Menurut bahasa Amar Maʿruf Nahi Munkar berkisar pada segala hal yang dianggap baik oleh manusia dan mereka mengamalkannya serta tidak mengingkarinya. Sedangkan menurut bahasa arab maʿruf adalah sesuatu yang dianggap baik oleh hati dan hati menjadi tenang dengan maʿruf tersebut. Amar adalah suatu tuntutan atau suatu perbuatan dan pihak yang lebih tinggi kedudukannya kepada pihak yang lebih rendah kedudukannya.

Sedangkan kata maʿruf adalah kata yang mencakup segala sesuatu hal yang dinilai baik oleh hati, dan jiwa merasa tenang dan tentram terhadapnya. Adapun kata Nahi menurut bahasa ialah suatu lafadz yang digunakan untuk meninggalkan suatu perbuatan yang dilarang. Sedangkan munkar secara etimologi adalah sebuah kata untuk menyebut sesuatu yang dipungkiri, tidak cocok, dinilai jijik, dan dianggap tidak baik oleh jiwa.¹⁷ Adapun menurut terminologi atau istilah syariat amar maʿruf nahi munkar merupakan sesuatu yang dengannya Allah menurunkan kitab-kitab-Nya dan mengutus para Rasul-Nya atau suatu kata yang mencakup hal-hal yang disukai Allah berupa ketaatan dan kebaikan terhadap hamba-hamba-Nya.¹⁸

Didalam agama Islam amar maʿruf nahi munkar merupakan hal yang menarik untuk dibicarakan. Karena dengan mengetahui amar maʿruf nahi munkar, maka umat Islam akan sadar bahwa solidaritas sesama muslim bisa diwujudkan dengan melakukan amar maʿruf nahi munkar. Untuk melakukan amar maʿruf nahi munkar perlu dilandasi rasa kasih sayang, sehingga dalam

¹⁶ Lilik Nurhaliza, *Konsep Amar Maʿruf Nabi Munkar Perspektif K.H. Hasyim Azyʿari di Indonesia*, Lampung: Skripsi IAIN Metro Lampung, 2019, 15.

¹⁷ Eko Purwono, *Amar Maʿruf Naby Munkar dalam Perspektif Sayyid Guthb*, Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama, 1, No. 2, (2018), 3.

¹⁸ Akhmad Hasan, *Amar Maʿruf Nabi Mungkar (Perintah kepada Kebaikan larangan dari kemungkaran)*, (Departemen Urusan Keislaman, 2018), 68.

melakukannya akan berjalan dengan baik. Amar ma'ruf nahi munkar merupakan fitrah manusia. Meskipun seseorang hidup sendiri dan mengasingkan diri dari manusia lainnya, namun jiwanya tetap memerintah dan melarangnya. Baik memerintahkan yang ma'ruf dan melarang yang munkar atau sebaliknya memerintahkan yang maruf dan melarang yang munkar atau memerintahkan keduanya.¹⁹

Sesungguhnya amar ma'ruf nahi munkar merupakan salah satu syi'ar Islam yang agung, ia merupakan salah satu tiang pengukuh mujtama' (masyarakat). Banyak nash yang menunjukkan hal itu, dan banyak dibicarakan kehidupan nyata. Sebagaimana telah dijelaskan Allah dalam al-Qur'an bahwa keistimewaan masyarakat muslim ialah menjadikan mulia umat Islam dengan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Karena sesungguhnya di antara amalan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah dengan cara saling menasihati dalam kebenaran serta mengajak kepada kebaikan. Makna amar ma'ruf nahi munkar yaitu hendaklah berusaha mengajak orang lain kepada kebaikan dan menghindarkan mereka dari keburukan. Islam sebagai agama individual dan sosial telah mewajibkan untuk memperbaiki diri sendiri dan mengajak orang lain kepada kebaikan. Selain sebagai kewajiban syari'ah, dakwah Islam merupakan kebutuhan masyarakat yang sangat primer. Masyarakat harus mengetahui pedoman hidup Islam yang merupakan kebutuhan masyarakat yang sangat primer. Sehingga dapat menegakkan perintah yang baik dan menjauhi yang dilarang.²⁰

Amar Makruf Nahi Munkar secara sederhana berarti menyeru kepada kebaikan dan mencegah keburukan.⁹ Prinsip ini bukan hanya dikenal dalam agama Islam saja, melainkan ia adalah prinsip universal yang ada dalam semua agama. Tak ada ulama baik dari zaman klasik maupun kontemporer yang berbeda pendapat

¹⁹ Ahmad Durrah, *Ensiklopedi Metodologi Al-Qur'an Akidah* 1,103.

²⁰ Abu Ammar dan Abu Fatiah Al-Adnani, *Mizanul Muslim 2 Barometer Menuju Muslim Kaffah*, (Solo: Cordava Mediratama, 2016), 145

bahwa Amar Makruf Nahi Munkar adalah salah satu asas agama dan kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah.

Hal tersebut demikian karena prinsip Amar Makruf Nahi Munkar telah dengan sangat lugas dijelaskan dalam Alquran di berbagai ayatnya, baik dalam bentuk penyifatan (pujian) terhadap umat Muslim maupun dalam bentuk perintah langsung. Di antara ayat-perintah dalam hal ini adalah sebagai berikut:

وَلْتَكُنَّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ؕ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya : Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemunkaran (ya'murūna bi al-ma'rūf wa yanhauna 'an al-munkar); merekalah orang-orang yang beruntung.²¹

Dalam ayat lainnya, Amar Makruf Nahi Munkar digambarkan sebagai sifat dan ciri utama umat Muslim dan sekaligus sebagai alasan mereka digelari sebagai umat terbaik (khaira ummah). Hal ini dapat dipahami sebab dengan terlaksananya prinsip terse but dalam suatu masyarakat (dalam hal ini masyarakat Muslim), maka otomatis tiap individu Muslim akan terus saling menasihati dan saling menebarkan kebaikan dan nilai-nilai kemanusiaan sehingga pada akhirnya akan membuat masyarakat Muslim menjadi masyarakat yang kokoh.

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ؕ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ

الْكِتَابِ لَكَ أَخَيْرٌ أَلَهُمْ ؕ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya : Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik (khaira ummah) yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkarannya (ta'murūna bi al-ma'rūf wa tanhauna 'an al-munkar), dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Sebagian di antara mereka ada orang-orang yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik.²²

²¹ QS. Ali Imran: 104.

²² QS. Ali Imran: 110.

Sedemikian pentingnya prinsip Amar Makruf Nahi Munkar, hukumnya bahkan sama dengan berperang melawan musuh di jalan Allah, yaitu fardu kifayah. Jadi di antara masyarakat Muslim wajib menunaikan kewajiban ini dengan baik, dan jika tidak maka seluruh masyarakat akan berdosa.²³ Selain mendapat dosa kolektif, masyarakat Muslim juga akan lebih berpotensi menjadi masyarakat yang bobrok sebab ketiadaan suatu prinsip perekat antara mereka. Dilihat dari sudut pandang yang lain, Amar Makruf Nahi Mungkar juga dapat dikategorikan sebagai ibadah yang berperan sebagai sarana pendekatan diri pada Allah. Ibadah yang dimaksud di sini adalah ibadah dalam maknanya yang luas. Dalam makna ini, ibadah mencakup keseluruhan kegiatan manusia dalam hidup di dunia ini, termasuk kegiatan duniawi sehari-hari, jika kegiatan itu dilakukan dengan niat pengabdian dan penghambaan diri kepada Allah, yakni sebagai tindakan moral.²⁴

Dalam hal ini Amar Makruf Nahi Munkar adalah ibadah sosial (*'ibādah ijtimā'iyah*) yang berada di samping ibadah murni (*'ibādah mahdhah*) seperti salat dan zakat, yang keduanya sama-sama diperintahkan oleh Allah. Namun hal yang perlu digarisbawahi adalah, bahwa Amar Makruf Nahi Munkar perlu diimplementasikan dengan cara yang ramah. Mengenai hal ini Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa penegakan prinsip ini seyogianya dengan memerhatikan sikap yang lemah lembut (*al-rifq*). “Sebab itu dikatakan: „Amar Makruf-mu seharusnya dilakukan dengan makruf, dan Nahi Munkar-mu seharusnya dilakukan tidak dengan munkar’”²⁵

Prinsip Amar Makruf Nahi Munkar juga tentu saja telah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad dan para nabi sebelumnya, sebab dengan tujuan itulah mereka semua diutus oleh Allah kepada

²³ Ibnu Taimiyah, *al-Amr bi al-Ma'ruf wa al-Nahy 'an al-Munkar*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Jadid, 1976), 15.

²⁴ Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, (Jakarta Selatan: Paramadina, 2008), 57.

²⁵ Ibnu Taimiyah, *al-Amr bi al-Ma'ruf wa al-Nahy 'an al-Munkar*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Jadid, 1976), 17.

manusia. Istilah-istilah seperti al-basyīr (pemberi kabar bahagia), al-nadzīr (pemberi peringatan), dan istilah-istilah sejenisnya adalah representasi dari tugas Nabi dalam mengimplementasikan prinsip Amar Makruf Nahi Munkar. Dengan prinsip inilah Nabi Muhammad dan para nabi sebelumnya berdakwah agar dapat dicamkan oleh masyarakat, sehingga ia akan menjadi prinsip dan fundamen dalam membentuk suatu masyarakat yang religius sekaligus aktif dan partisipatif.

Menurut Ibnu Taimiyah, praktik Amar Makruf Nahi Munkar dapat melalui tiga cara, yakni dengan hati (al-qalb), lisan (al-lisān), maupun kekuasaan (al-yad). Ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad bahwa “siapa saja di antara kalian yang melihat kemungkaran maka ubahlah ia dengan kekuasaannya, kalau ia tak mampu maka dengan lisannya, kalau ia masih tak mampu maka [cukup] dengan hatinya.”

Setiap manusia di muka bumi wajib melaksanakan amar maʿruf nahi munkar, dan juga harus disuruh kepada yang maʿruf dan mencegah dari yang munkar. Bahkan sekalipun ia sendirian, masih tetap melakukannya terhadap dirinya sendiri. Menegakkan amar maʿruf nahi munkar merupakan tanggungjawab semua muslim untuk menjamin keadilan, keselamatan dan kesejahteraan masyarakat dan negara. Adanya kesadaran akan amar maʿruf nahi munkar pertanda bahwa ia adalah orang beriman, begitu sebaliknya jika tiadanya kesadaran akan amar maʿruf nahi munkar merupakan ciri orang munafik.²⁶

Dalam berbagai ayat al-Qurʿan lainnya Allah Swt telah menggambarkan kaum mukminin sebagai kelompok yang melaksanakan amar maʿruf nahi munkar. Ia juga mengaitkan hal itu dengan pelaksanaan salat dan zakat. Ketahuilah, bahwasanya hukum beramar maʿruf nahi munkar adalah fardu kifayah, yaitu apabila sebagian umat telah melaksanakannya, gugurlah ancaman dosa atas

²⁶ Nor Azean Binti Hasan Adali, *Amar Maʿruf Nahi Mungkar Menurut Perspektif Imam Al-Ghazali*, (Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018), 1.

sebagian yang lainnya. Namun, pahalanya hanya diperuntukkan bagi mereka yang menjalankannya saja. Dan apabila tidak ada seorang pun yang melaksanakannya maka seluruh umat menanggung dosa, terutama mereka yang memiliki kemampuan melaksanakannya. Dan wajib atas diri kalian sendiri apabila mengetahui dan menyaksikan seseorang meninggalkan ma'ruf, akan tetapi mengerjakan munkar, maka wajib memberi pelajaran dimana yang ma'ruf atau munkar. Apabila tidak didengarnya, kewajiban kita dengan menasehatinya atau menakutinya. Apabila masih belum tuntas, maka atas dirimu memaksanya dengan suatu tindakan tegas seperti memukulnya.²⁷

Dalam kaitannya dengan masyarakat muslim amar ma'ruf dan nahi munkar merupakan hak dan kewajiban bagi mereka, salah satu prinsip politik dan sosial. Al-Qur'an dan hadits Nabi telah menjelaskan hal itu dan memerintahkan orang untuk memberikan nasihat atau kritik bagi pemangku kekuasaan dalam masyarakat, dan meminta penjelasan hal-hal yang tidak menjadi baik bagi rakyat. Karena yang menjadi tolok ukur kebaikan dan kemungkaran adalah syariat.²⁸

Dalam al-Qur'an disebutkan bahwa Allah menjelaskan tujuan adanya amar ma'ruf nahi munkar diantaranya:

- a. Agar mendapat kebaikan dan mencegah dari keburukan.
- b. Agar terjalin ukhuwah islamiyyah. Sebagaimana contohnya tidak boleh ada seorang muslim yang kelaparan sementara orang-orang muslim yang ada disekitarnya merasa kenyang, seandainya terjadi hal demikian maka orang muslim tersebut diperkenankan meminta kebutuhannya kepada orang-orang muslim yang ada disekitarnya dengan kekerasan dan orang-orang muslim berdosa karena lalai dan tidak membantunya.

²⁷ Allamah Sayyid Abdullah Haddad, *Thariqah Menuju Kebahagiaan*, (Bandung: Mizan, 2000), 200.

²⁸ Kusnadi, *Makna Amar Ma'ruf Nabi Munkar Menurut Muhammad Asad Dalam Kitab The Message Of The Qur'an*, 114.

- c. Agar mendapat jaminan terhindarnya dari adzab Allah yang menimpa masyarakat yang didalamnya ada kerusakan yang merajalela.
- d. Agar mendapatkan rahmatan lil ‘alamin yaitu sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Untuk mewujudkan hal tersebut dalam kenyataan, sekaligus untuk mempertahankan kedudukan orang mukmin sebagai umat yang terbaik yang ditampilkan Allah di kehidupan ini, maka sangat diperhatikan suatu konsepsi yang harus dilaksanakan secara konsekuen. Konsep ini tidak lain melaksanakan amar ma‘ruf nahi munkar tanpa adanya cadangan sesuai dengan al-Qur‘an. Terlebih dalam kemajuan dimasa ini, dimana kehidupan manusia senantiasa diwarnai dengan pertarungan dan pertentangan yang demikian dahsyat, maka dengan adanya keberanian sikap untuk melaksanakan amar ma‘ruf nahi munkar tersebut sangat diperlukan demi terwujudnya Izzul Islam wal muslimin.

Ibnu Taimiyah menambahkan, jika wajib hukumnya bagi orang, yang memerintahkan perkara yang *ma‘ruf* dan mencegah dari kemungkaran, untuk melakukannya dengan ikhlas karena Allah, dengan maksud taat kepada Allah. Hendaknya pula, tujuannya adalah untuk memperbaiki orang yang diperintah, menegakkan *hujjah* (alasan) kepadanya, dan jangan bertujuan untuk mencari kedudukan, baik untuk dirinya maupun untuk kelompoknya, atau untuk melecehkan orang lain.

Sesungguhnya *amar ma‘ruf nahi munkar* patut mendapat perhatian, karena ia mewujudkan kebaikan dan keselamatan umat. Di dalam melaksanakannya terkandung bahaya besar dan kerusakan merata, tertutupnya keluhuran dan munculnya kenistaan. Allah menyatakan kedudukannya yang tinggi sampai di sebagian ayat, Allah mendahulukannya di atas iman yang merupakan dasar agama dan asas Islam.

Sikap ikhlas juga sangat berpengaruh pada sukses atau tidaknya kegiatan amar makruf dan nahi mungkar dalam masyarakat. Hal tersebut karena perbuatan yang didasari keikhlasan bisa lebih memberikan hasil yang baik dibandingkan perbuatan yang tidak didasari keikhlasan. Ketika amar makruf dan nahi mungkar tidak didasari keikhlasan maka hal tersebut menyebabkan ketidaksabaran, terburuburu, dan memperturutkan hawa nafsu dalam beramar makruf dan nahi mungkar, hal tersebut menyebabkan kegagalan dan bahkan bisa semakin menjauhkan seseorang dari ajaran Islam. Oleh karena itu keikhlasan menjadi hal yang sangat penting dalam kegiatan amar makruf dan nahi mungkar.

Bagi seorang yang melakukan amar makruf dan nahi mungkar hendaklah terlebih dahulu memepertimbangkan sisi manfaat dan mudaratnya, jika manfaat yang dihasilkan dari kegiatan amar makruf dan nahi mungkar lebih besar dari mudarat yang ditimbulkan, maka saat itu amar makruf dan nahi mungkar merupakan hal yang diperintahkan. Jika manfaat yang dihasilkan lebih sedikit dari mudarat yang ditimbulkan maka saat itu kegiatan amar makruf tidak dianjurkan, bahkan bisa jadi hal tersebut menimbulkan dosa. Jika manfaat yang dihasilkan sama besarnya dengan mudarat yang mungkin terjadi maka saat itu amar makruf dan nahi mungkar tidak diperintahkan dan tidak pula dilarang.

Jika belum diketahui manfaat yang didapatkan atau mudarat yang dihasilkan dari kegiatan amar makruf dan nahi mungkar, maka siapa saja yang berniat untuk melakukannya harus menunggu dan mencari tahu terlebih dahulu sampai diketahui apakah manfaat atau mudarat yang lebih besar. Amar makruf dan nahi mungkar bukan sekedar perintah yang harus segera dilaksanakan, tetapi amar makruf dan nahi mungkar adalah sebuah ibadah yang menuntut hasil yang baik, oleh sebab itu pelaksanaannya haruslah dengan ilmu dan kesabaran serta perhitungan yang matang.

Hal ini sebetulnya menggambarkan keluasan sarana yang dapat digunakan dalam menjalankan prinsip Amar Makruf Nahi Munkar, yakni boleh melalui kekuasaan seperti pemerintah maupun melalui nasihat-nasihat secara verbal maupun melalui tulisan.

2. Implementasi Amar Makruf Nahi Munkar Sebagai Etika Politik Islam.

Etika politik Islam mencakup nilai-nilai universal yang termaktub baik secara eksplisit maupun implisit dalam Alquran dan Hadis, seperti nilai keberanian mengemukakan kebenaran, kesabaran dalam mengakui kesalahan, dan toleransi dalam menghadapi perbedaan pendapat dan gagasan. Semua nilai-nilai tersebut adalah turunan dari suatu prinsip utama Amar Makruf Nahi Munkar. Dalam prinsip ini tiap warga negara akan berhubungan dengan aktif dan mutual, saling memberikan masukan demi kemaslahatan bersama.

Dalam Alquran, terdapat satu ayat sentral mengenai etika sosial-politik Islam yang merupakan prinsip terbentuknya masyarakat Muslim yang berkeadaban, yaitu sebagai berikut:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ

الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ

Artinya : “Orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian dari mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar (ya'murūna bi al-ma'rūf wa yanhauna 'an al-munkar), menegakkan shalat, menunaikan zakat, serta taat kepada

Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.”²⁹

Seakan menguatkan makna surat Ali Imran ayat 110 yang dikutip sebelumnya, ayat ini menggambarkan bahwa ciri utamamasyarakat Muslim adalah saling tolong menolong dan menjalankan Amar Makruf Nahi Munkar, selain menegakkan salat dan menunaikan zakat. Ayat ini bersama ayat-ayat lainnya menjadi pedoman bagi para individu-individu Muslim dalam membentuk masyarakat kuat dan berkeadaban.

Menurut Bayyumi, ada beberapa nilai yang telah diajarkan oleh Islam dalam bernegara namun jarang disadari, yang pada dasarnya semua itu berada dalam prinsip Amar Makruf Nahi Munkar, di antaranya: pluralisme dan dialog (*al-ta’addudiyah wa al-hiwar*), kritik pemerintah (*muhasabah al-sulthah*), kewarganegaraan (*almuawathanah*), dan sebagainya.³⁰

Semua nilai-nilai tersebut adalah bagian-bagian penting dari prinsip utama yang harus saling menguatkan satu sama lain, sebagaimana nilai-nilai tersebut juga bersifat dinamis sesuai dengan kondisi masyarakat yang juga dinamis. Pada akhirnya, manusia tak dapat hidup sendiri karena ia merupakan makhluk sosial. Dalam kehidupan sosial tersebut, manusia membentuk suatu pemerintahan yang bertujuan untuk membentuk suatu masyarakat yang abadi dalam keadaan hak-hak para warga negara terpenuhi.

Sebagai makhluk sosial-politik, manusia dituntut untuk tetap memegang teguh prinsip Amar Makruf Nahi Munkar. “Jika berkumpul dua orang atau lebih maka sudah sewajarnya mereka saling ber-Amar Makruf Nahi Munkar. Itulah sebabnya kenapa salat jamaah harus terdiri dari minimal duaorang, yang satu [berperan] sebagai imam dan yang lainnya [berperan] sebagai makmum.”

²⁹ QS. Al-Taubah: 71.

³⁰ Abd al-Mu’thi Muhammad Bayyumi, *al-Islam wa al-Daulah alMadaniyyah*, (Kairo: al-Hai’ah al-Mishriyyah al-,Ammah li al-Kitab, 2019).

Amar ma'ruf nahi munkar dilengkapi dengan etika-etika tertentu sehingga tidak menjadi kemunkaran itu sendiri karena melewati batas-batas syar'i yang keluar dari rambu-rambunya. Hanya orang-orang yang memiliki sifat-sifat kelembutan, perhatian, paham, serta bersih dari riya', nafsu dan sum'ah yang bisa melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Setiap orang yang ingin melaksanakan kewajiban untuk menyeru kepada kebaikan dan melarang kemungkaran, harus memenuhi syarat sesuai dengan tuntunan yang di syariatkan untuk beramar ma'ruf nahi munkar, hendaknya harus didasarkan dengan tuntunan dan konsekuensi syariat. Dan untuk itulah kita harus mengerti dan tahu etika-etika beramar ma'ruf nahi munkar.

1. Memiliki ilmu agama. Bagi pelaksana amar ma'ruf nahi munkar harus memiliki dan memahami benar dan mampu membedakan antara yang ma'ruf dan yang munkar, hukum-hukum syar'i untuk dapat mengetahui wilayah hukum, hisbah (Amar ma'ruf nahi munkar), batasannya, proses, halangan/halangannya, juga mampu menegakkan hukum syar'i disana dan termasuk orang yang amanah atau dapat dipercaya. Apabila ia tidak memiliki ilmu agama, dikhawatirkan ia tidak mampu membedakan keduanya mana yang ma'ruf dan yang munkar sehingga bisa terjadi yang ma'ruf dianggap munkar dan yang munkar dianggap yang ma'ruf.³¹
2. Al-wara' (takut dosa) Manusia memiliki sifat wara' akan mencegahnya dari perkara yang belum jelas halal atau haramnya dan nasihatnya akan diterima dengan baik. Adapun ucapan orang fasik atau orang yang melanggar larangan Allah tidak akan didengar dan dihormati.

³¹ Abdul Karim Syeikh, *Rekonstruksi Makna dan Metode Penerapan Amar Ma'ruf Nahi Munkar Berdasarkan Al-Qur'an*, Al-Idarah: Jurnal Manajemen dan Administrasi Islam, 2, No. 2, (2018), 23.

3. Khusnul Khuluq Memiliki akhlak yang baik dari sikap pemaarah merupakan pengendali amar ma`ruf nahi munkar. Al-wara` dan ilmu tidak akan berguna kembali kecuali dengan akhlak mulia. Sebab kemampuan untuk mengendalikan nafsu dan amarah adalah dua sifat yang harus dimiliki oleh penegak amar ma`ruf nahi munkar.
4. Ar-rifqu (kelembutan) Tidak ada sesuatu pun yang dimasuki unsur kelembutan kecuali akan memperindahkannya.

Etika politik dan moral kepemimpinan Islam maupun kepemimpinan di luar Islam sangat ditentukan oleh penguasa. Oleh karena itu, yang menghendaki sebuah pemerintahan yang adil dan didasari oleh nilai etika, maka harus banyak belajar dari realitas yang terjadi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai ke-adilan sehingga tercipta suatu kedamaian. Sebuah pemerintahan yang tidak didasari nilai-nilai etika dan moral yang baik, akan menimbulkan kekecauan. Apalagi pemimpinnya yang tidak menanamkan nilai etika, sudah pasti kekuasaannya akan hancur. Oleh sebab itu penguasa yang baik adalah penguasa yang memberikan suasana kebahagiaan bukan sebaliknya.

Berbagai belahan dunia, umat Islam mengalami berbagai macam krisis baik krisis ekonomi, krisis keamanan, krisis kepercayaan, krisis politik dan berbagai krisis lainnya, namun semuanya ini diawali dari krisis moral seorang pemimpin bangsa, kemudian diikuti oleh kehancuran moral rakyat. Maka tidak heran jika negara yang sedang mengalami krisis, banyak kejahatan yang terjadi baik berupa korupsi, perampokan, pembunuhan, bahkan sampai kepada tindakan-tindakan asusila. Sebuah pemerintah sudah jauh dari nilai etika, maka sudah dapat dipastikan negara tersebut akan mengalami kehancuran, dia tidak mampu mempertahankan kedaulatan rakyat, akhirnya rakyat yang menjadi sasaran. Mereka apatis terhadap rakyat dan tidak mampu menjaga persatuan dan kesatuan.

Mencintai rakyat dan berbuat baik terhadap rakyat merupakan suatu etika atau moral yang terpuji di dalam Islam dan menjadi seorang kepala negara sebagai orang yang terbaik yang dibanggakan. Tetapi sebaliknya sifat membenci rakyat dan menjauhi rakyat serta mempertahankan paham egoistis dan tabiat sombong akan menjadi tanda moral yang tercela yang menyebabkan kepada orang yang jahat yang tidak disukai oleh rakyat.³²

Selain pemerintah, rakyatpun harus beretika dan bermoral baik. Ali bin Abi Thalib dalam pidatonya kepada rakyat yang mengikutinya; Demi Tuhan, sesungguhnya berat dugaan saya, bahwa musuh-musuh itu akan menang mengalahkan kamu karena moral mereka yang baik, yaitu mereka bersatu padu walaupun di dalam kesesatan, sedangkan kamu terpecah belah dalam kebenaran. Penguasa yang adil adalah penguasa yang berbuat adil diantara manusia dan menahan diri dari perbuatan jahat dan kerakusan. Penguasa yang zalim adalah penguasa yang kejam dan kekuasaannya tidak akan langgeng. Kelanggengan hanya akan terjadi dengan perilaku terhadap rakyat dan memelihara urusan-urusan secara bersama-sama. Harus diketahui bahwa kemakmuran dan keruntuhan dunia bergantung kepada penguasa, jika penguasa adil maka dunia akan makmur dan rakyat merasa aman.³³

Salah satu penyebab meningkatnya kebobrokan etika dan moral suatu bangsa adalah penganutnya tidak menjalankan agamanya dengan baik. Karena pada dasarnya setiap agama mengajarkan kebenaran. Dengan demikian, kebobrokan etika suatu bangsa tidak boleh menyalahkan agama karena agama merupakan faktor yang sangat penting menyangkut moral bangsa. Tetapi yang harus disalahkan adalah penganut agama yang bersangkutan. Dari agama itulah muncul nilai-nilai iman, dan dengan adanya iman yang

³² Zainal Abidin Ahmad, *Konsepsi Negara Bermoral Menurut Imam Al-Ghazali* (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 159.

³³ Imam Al-Ghazali, *At-Tibr Al-Masbuk fi Nashibah Al-Muluk*, diterjemahkan oleh Arie B. Iskandar dengan judul *Etika Berkuasa, Nasehat Imam Al-Ghazali* (Cet. I; Bandung: Pustaka Hidayat, 2001), 78.

tertanam dalam setiap penganut agama, maka dengan sendirinya akan lahir etika dan moral yang tinggi. Hanya dengan modal dasar kepribadian seperti itu, aparat pemerintah dapat dibina lebih lanjut agar membangun komitmen moral yang lebih spesifik untuk mentaati nilai-nilai etika profesinya.

Peran pemimpin sungguh sangat menentukan dalam kehidupan masyarakat, rusak rakyat karena rusak penguasa dan rusak penguasa karena rusak ulamanya. Semuanya itu membenarkan kesimpulan bahwa pemimpin adalah teladan, sehingga teladan yang baik akan memberikan hasil yang baik dan demikian pula sebaliknya. Oleh karena itu menurut Al-Ghazali, ulama harus tegak menjaga fungsinya sebagai pemegang amanah Allah, penjaga waris Nabi dan penegak politik keadilan. Para ulama cendekiawan harus bersikap waspada dan jangan mendudukkan diri kepada politik kezaliman (zalim terhadap kehormatan dan hak asasi manusia, zalim terhadap harta benda rakyat, dan zalim terhadap jiwa rakyat), bahkan jika dianggap perlu harus mengambil sikap uzlah, menjauhkan diri dari segala soal yang berbau politik dan pemerintah.

Masalah kepemimpinan dewasa ini merupakan kunci utama dalam menuju negara dan masyarakat yang bermoral. Struktur kejahatan itu adalah akibat politik kekuasaan. Perimbangan kekuatan politik mengabaikan upaya serius mengatasi korupsi dan ketidakadilan. Praktek kekuasaan dijalankan bukan atas dasar etika politik, namun untuk mempertahankan kekuasaan. Maka banyak konsesi diberikan yang mengorbankan tujuan utama politik (kesejahteraan bersama). Etika dan moral kepemimpinan Islam maupun kepemimpinan di luar Islam sangat ditentukan oleh penguasa.

Alquran sebagai sumber gagasan etika politik berusaha menanamkan perilaku yang baik kepada para pemimpin untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang berwibawa. Oleh karenanya

perilaku rakyat sangat tergantung dari kebijakan para pemimpin, rakyat bermoral adalah cerminan dari seorang pemimpin. Pemimpin yang bertanggungjawab adalah pemimpin yang beretika dan bermoral yang bersumber dari nilai-nilai luhur agama. Dengan demikian segala tindakan yang baik, adil, beramanah dari pemimpin akan mendapatkan syafaat, selama pemimpin tidak keluar dari koridor yang telah digariskan oleh Allah swt dalam Alquran sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Perinsip dasar dalam etika politik Islam adalah menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan menghormati hak-hak asasi manusia, sehingga tercipta suatu kedamaian yang berkelanjutan dibawah norma-norma agama. Dan ketika segala aktifitas politik yang dilakukan senantiasa dituntut oleh nilai-nilai yang bersumber dari Alquran, maka aktifitas yang dilakukan mendapat berkah yang berlipat ganda, sehingga terhindar dari malapetaka yang disebabkan karena melakukan keterpurukan atau kemungkaran.

Islam dan politik sangat berkaitan erat, Islam meletakkan politik sebagai salah satu cara menjaga umat Islam. Islam tanpa politik akan melahirkan terbelenggunya kaum muslimin yang tidak mempunyai kebebasan dan kemerdekaan melaksanakan syariat Islam. Begitu pula politik tanpa Islam, hanya akan melahirkan masyarakat yang mengagungkan kekuasaan, jabatan, dan duniawi saja. Maka perlu menerapkan nilai-nilai Islam dalam Politik khususnya di Indonesia, karena dapat dijadikan sebagai sebuah acuan dalam menjalankan dinamika perpolitikan di Indonesia.

Secara konkret, implementasi prinsip *Amar Makruf Nahi Munkar* dalam sebuah negara di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Rapat dalam merumuskan undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Para anggota dewan dipilih oleh rakyat untuk mengemban tugas membuat dan menguji undang-undang yang nantinya akan diterapkan pada

masyarakat. Karena itu dalam perumusannya akan dilakukan dengan melalui rapat yang panjang dan beberapa kali uji materi. Perdebatan yang terjadi dalam rapat ini merupakan contoh dari proses Amar Makruf Nahi Munkar, artinya di dalam rapat akan terjadi demonstrasi antar gagasan yang sama-sama dianggap baik (makruf), dan pada akhirnya nanti akan terpilih gagasan dengan suara terbanyak yang diharapkan akan paling sesuai dengan masalah masyarakat.

- b. Patroli polisi dalam mengamankan lalu lintas dan pengawalan demonstrasi serta kerusuhan-kerusuhan yang terjadi. Polisi tak dapat diragukan lagi adalah tangan pemerintah dalam menertibkan masyarakat. Patroli ini adalah bentuk Amar Makruf Nahi Munkar di mana, misalnya, keamanan lalu lintas adalah hal yang makruf sedangkan melanggar aturan lalu lintas adalah hal yang munkar. Begitu juga dalam hal pengawalan ketika terjadinya demonstrasi dan pengamanan ketika terjadi kerusuhan, juga merupakan usaha dalam meminimalisir perbuatan-perbuatan anarkis dan tindakan buruk lainnya (munkar).
- c. Kegiatan-kegiatan ormas-ormas dan LSM-LSM dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat maupun kritik terhadap pemerintah. Hal ini adalah konsekuensi logis dari diterapkannya sistem demokrasi, yakni memungkinkan adanya masyarakat yang saling membantu dalam kebaikan dan memberi aspirasi kepada pemerintah dalam kaitannya dengan kebijakan yang akan atau sedang dirumuskan. Ormas dan LSM di sini bergerak ke dua arah, yakni (1) sesama masyarakat, yaitu dalam upaya mereka mengembangkan masyarakat dalam bidang pendidikan, sosial, dan ekonomi, yang juga merupakan concern pemerintah; juga (1) kepada pemerintah, sebagai penyalur kritik konstruktif dan aspirasi dari masyarakat. Tak diragukan lagi bahwa membimbing masyarakat dan menyalurkan kritik kepada pemerintah

adalah bentuk konkret dari prinsip Amar Makruf Nahi Munkar.

Sebuah pemerintahan akan berjalan efektif, jika dipegang oleh pemimpin-pemimpin yang amanah. Baik pemerintah daerah maupun pusat. Dalam konteks ke-Indonesia-an, pemimpin oleh rakyat melalui mekanisme pemilu. Dengan harapan, pemilihan umum tersebut akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang sesuai dengan harapan rakyat, yang lebih mementingkan kepentingan rakyat daripada kepentingan kelompok atau dirinya sendiri.

Idealnya, calon pemimpin yang jadi adalah orang yang berkualitas secara keilmuan dan pengalaman dalam memimpin. Namun realitas berbicara lain. Siapa yang dapat mendapat dukungan suara yang paling banyak dan memenuhi persyaratan batas atas minimal perolehan suara-lah yang mendapat jatah kursi tersebut. Meskipun, dalam proses perolehan suara itu terdapat intrik-intrik *money politic* atau yang lain, tidak terlalu dipersoalkan. Padahal, jika pemimpin lahir dari proses pemilihan yang mengeluarkan banyak dana, maka dapat dipastikan, kelak ia pasti ingin mengembalikan modal yang telah ia keluarkan dan cenderung koruptif. Belum lagi adanya kampanye hitam (*black campaign*) pun seolah dilegalkan, demi mengalahkan kandidat lain dan mendapat simpati dari rakyat. Aturan-aturan proses penjangkalan calon kandidat pun, konon juga dapat di-*setting* sesuai dengan yang diinginkan oleh pihak-pihak tertentu.

Dengan melihat realitas politik yang ada di atas, seolah-olah etika politik sudah tidak berlakulagi, bahkan dapat dikatakan tidak ada. Etika politik hanya dibicarakan dalam tataran teori saja. Dalam politik, seolah-olah, yang ada adalah tujuan politik tercapai dengan segala cara, bahkan menghalalkan segala cara. Benarkah demikian? Tulisan ini akan mencoba mengabstraksikan beberapa pemikiran etika politik dalam Islam, yang terfokus pada pemikiran politik

klasik dan pertengahan awal, dan relevansinya dengan kondisi perpolitikan di Indonesia dewasa ini.

Suatu sistem pemerintahan seharusnya dapat menetapkan hukum-hukum sosial-politik yang dapat diterima dan diikuti oleh rakyatnya secara konsisten dan universal. Proses pembentukan hukum pemerintahan sangat berpengaruh pada bentuk kekuasaan negara dan bukan pada sistem pemerintahannya.⁴ Apakah hukum tersebut berdasarkan bentuk kekuasaan negara yang bersifat dunia ataupun yang bersifat agama. Hendaknya suatu negara itu bisa menerapkan hukum sosial-politiknya secara adil dan menyeluruh, walaupun masyarakatnya terdiri dari beberapa agama.

Dengan kata lain, semestinya bentuk hukum dalam suatu pemerintahan itu ialah bersifat agama dan sekaligus bersifat keduniawian. Misalnya, dalam sistem pemerintahan Negara Islam yang bersubstansikan sebagaimana negara sekuler yang juga berlandaskan pada fanatisme, solidaritas, dan kekuatan golongan, karena ketiga unsur itu ialah unsur terpenting dalam pembentukan suatu negara, baik dalam peradaban Islam maupun bukan Islam.

Negara juga membutuhkan perangkat hukum yang positif, yakni hukum ijtihadi yang didasarkan pada nilai-nilai keislaman untuk menghadapi tuntutan zaman yang dinamis dan selalu berkembang. Dalam hal ini, Ibnu Khaldun memperbolehkan penyesuaian hukum dalam kehidupan bernegara.

Etika politik bukanlah suatu sistem yang berbelit-belit. Secara sederhana, etika politik dapat diartikan sebagai sejumlah nilai luhur yang seharusnya diterapkan dalam perilaku politik, undang-undang, hukum, dan kebijakan dalam pemerintahan. Namun terkadang keputusan dan kebijakan politik itu tidak memperhatikan hati nurani karena lebih suka melayani kepentingan sendiri dari pada kepentingan rakyatnya. Padahal secara sistem demokratis, rakyatlah yang memberikan kekuasaan kepada para pemimpinnya.

Etika politik memberi patokan dan norma penilaian mutu politik terhadap pemerintahan negara dengan tolak ukur martabat manusia. Kajian etika politik dalam Islam bukan semata-mata untuk kepentingan ilmu dan kritik ideologi, ataupun merupakan bagian dari cabang filsafat, melainkan bagian integral dari syari'at yang wajib diamalkan oleh setiap muslim dalam kehidupan. Politik harus dijalankan dengan nilai-nilai etika sehingga mencapai tujuannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat atas dasar keadilan social.

Mengenai sistem dan bentuk negara, agama Islam juga tidak memberikan perincian yang jelas. Islam hanya memberikan penegasan mengenai proses pelaksanaan pemerintahan yaitu keadilan, kejujuran, keikhlasan, dan segala sesuatu yang menyangkut hukum (syari'at) dikembalikan kepada al-Qur'an dan Sunnah Nabi – tidak boleh penguasa menyimpang dari syari'at.

Islam tidak mengharuskan suatu bentuk pemerintahan apapun, selama pemerintahan itu dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam yang benar. Segala aspek-aspek yang buruk dalam suatu negara merupakan keburukan yang muncul dalam pemerintahan tanpa etika. Politik tidak hanya mencakup persoalan negara, tetapi juga membahas tentang hubungan antar manusia dalam bentuk-bentuk pengawasan, pengaruh, kekuasaan atau otoritas secara luas. Dengan demikian, politik dapat mengarah pada objek pembahasan dalam lingkup pemikiran dan tindakan atau perilaku politik dalam perspektif filsafat etika. Dengan etika, manusia akan dibimbing menjadi politikus yang memiliki keprihatinan terhadap masyarakat dan bertindak atas dasar pertimbangan-pertimbangan akal yang sehat agar masyarakatnya bisa hidup aman dan sejahtera.

Seorang pemimpin harus memiliki superioritas atau keunggulan dan kekuasaan untuk berkehendak, serta kebijaksanaan untuk memutuskan suatu perkara sehingga keputusannya

merupakan kata akhir yang harus dilaksanakan. Namun, terkadang seorang pemimpin itu memerintah secara tidak adil, lebih mementingkan keinginannya sendiri, dan tidak mementingkan rakyatnya. Oleh sebab itu, setiap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh seorang pemimpin harus didasarkan kepada peraturan-peraturan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan dalam politik yang harus dipatuhi oleh semua pihak.

Menurut ajaran agama, seorang pemimpin itu harus pula mengemban tugas sebagaimana yang diperintahkan oleh agama untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar melalui dukungan kekuatan dan kekuasaan dari negara atau pemerintah. Tujuan dari berdirinya suatu negara adalah melaksanakan sistem sosial yang baik, menegakkan keadilan, mencegah segala macam bentuk kemunkaran atau penyimpangan terhadap norma agama dan umum, serta senantiasa menganjurkan kepada umat manusia untuk melaksanakan kebajikan sebagai realisasi dari perintah agama.

Penutup

Berdasarkan penelitian dalam skripsi “Implementasi Prinsip *Amar Makruf Nahi Munkar* Sebagai Etika Politik Islam”, dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Amar Makruf Nahi Munkar adalah prinsip dasar dalam Islam yang mencakup berbagai aspek kehidupan. Secara normatif Islam telah mengajarkan prinsip Amar Makruf Nahi Munkar di berbagai ayat Alquran dan praktik Nabi Muhammad sendiri. Pada masa kini, terlebih di negara-negara dengan sistem pemerintahan yang demokratis, prinsip ini perlu diimplementasikan sebagai etika politik yang akan memandu langkah negara-negara tersebut pada kekuatan dan keadaban yang dicita-citakan. Prinsip ini akan mengantarkan pelakunya pada sikap yang aktif-partisipatif dalam menebarkan kebaikan demi kemaslahatan bersama.

2. Implementasi *Amar Makruf Nabi Munkar* pada etika politik Islam adalah memiliki beragam, dapat berupa kritik masyarakat kepada pemerintah tentang suatu rancangan undang-undang (RUU), kritik antar masyarakat tentang urgensi pengembangan ekonomi negara, kritik pemerintah terhadap masyarakat dalam praktik undang-undang atau kebijakan yang ada, dan bentuk-bentuk lainnya yang tak terbatas.

Daftar Pustaka

- Amin, Samsul Munir. 2009. *Ilmu Dakwah*. Jakarta : Amzah
- Al- Qur'an Karim
- Al-Hafidz, Ahsin W. 2008. *Kamus Ilmu al-Qur'an*. Jakarta : Amzah
- Anggriani Alamsyah, Amggriani. 2012. *Etika Politik*. Makasar: Alauddin University Press.
- Aash-Shaallabi, Ali Muhammad. 2009. Biografi Imam Al-Ghazali & Syekh Abdul Qadir Jailani, Jakarta: Beirut Publishing.
- Awaliah, Neneng Nur. (2012). *Etika Politik: Pemikiran Komarudin Hidayat*. Jakarta.
- Al-Nawawi, Muhyiddin bin Syaraf. 2016. *Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawi*. Kairo: Syarikah al-Quds.
- Azra, Azyumardi. 2017. *Transformasi Politik Islam; Radikalisme, Khilafatisme, dan Demokrasi*. Jakarta: Prenadamedia Grup.
- Baasir, Faisal, *Etika Politik: Pandangan Seorang Politisi Muslim* Cet. I; Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003.
- Bahri, S., & Hadijah, B. (2020). Kedudukan Dakwah dan Amar Makruf Nahi Munkar. *Pendidikan dan Studi Islam*, 1(2).
- Basyuni, Kamal. 1993. *Qa'id al-Fikr al-Islami: Umar bin al-Khatthab*. Kairo: Maktabah al-Nahdhah al-Mishriyyah.
- Bayyumi, Abd al-Mu'thi Muhammad. 2019. *Al-Islam wa al-Daulah al-Madaniyyah*. Kairo: Al-Hai'ah al-Mishriyyah al-,Ammah li al-Kitab.
- Hamka. (1983). *Tafsir Al-Azhar*. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Handoyo, E., Susanti, M. H., & Munandar, A. M. (2016). *Etika Politik*. Semarang: Widya Karya Press.
- Ibnu-Taimiyah. 1976. *Al-Amr bi al-Ma'ruf wa al-Nahy 'an al-Munkar*. Beirut: Dar al-Kitab al-Jadid.
- Idrus, M. (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Erlangga.

- I Made Kartika. (2015). Nilai-Nilai Pancasila Dalam Membangun Etika Politik di Indonesia. *Widya Accarya*. 4(1): 1-9
- Jawas, Yazid bin Abdul Qadir. 2017. *Amar ma'ruf Nahi Munkar*, depok; PUSTAKA KHAZANAHFAWA'ID.cet-1.
- Lajnah Jurusan Dakwah dan Kebudayaan Islam Universitas al-Azhar. *Adbwa' 'ala al-Nuzhum al-Islamiyyah*.
- Lajnah Pentashih Mushaf Al- Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, Al- Quran dan Terjemah, Bandung: PT. Sygma Exmedia Arkanleenma
- Magnis, Franz Suseno, 2016. *Etika Politik*, Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Maarif, Ahmad Syafii. "Sistem Khilafah dalam Tradisi Islam". *Ti-tik-Temu*. Vol. 1, No. 2, Januari-Juni 2009.
- Madjid, Nurcholish. 2008. *Islam; Doktrin dan Peradaban*. Jakarta Se-latan: Paramadina.
- Muhsin, Haryanto. 2014. *Etika Politik di Indonesia*. <http://muhsinhar.staff.umy.ac.id/etikapolitik-di-indonesia/>. Diakses pada tanggal 23 November 2018
- RI, K. (2013). *Amar Makruf Nahi Munkar*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf AlQur'an.
- Salam, Burhanuddin. 2002. *Etika Sosial dan Asas Moral dalam Kehidupan Manusia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.
- Salim, Abdul Muin, *Konsep Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an*, Cet. III; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sukayat, Tata. 2009. *Quantum Dakwah*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Wulansari, A. D. (2012). *Penelitian Pendidikan: Suatu Pendekatan Praktis dengan menggunakan SPSS*. Ponorogo: Stain Po Press.
- Zed, M. (2018). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Zulkarnain, K. Z. (2017). Makna Amar Makruf Nahi Munkar Menurut Muhammad Asad Dalam Kitab The Messange of The Qur'an. *Wardah*, 18(02).